



RENJA **Tahun 2025**

RENCANA KERJA
BADAN KEUANGAN DAERAH
KAB. PURBALINGGA

BADAN KEUANGAN DAERAH
Jl. Onje No. 4 Purbalingga
Telepon: (0281) 891098, 893116, 96216
Email: bakeuda.purbalinggakab.go.id

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI -----	i
DAFTAR TABEL -----	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Landasan Hukum -----	1
1.3 Maksud dan Tujuan -----	4
1.4 Sistematika Penulisan -----	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rensta Badan Keuangan Daerah -----	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah -----	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah -----	31
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD -----	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ----	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional -----	48
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah -----	49
3.3 Program dan Kegiatan -----	53
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH -----	56
BAB V PENUTUP -----	68
LAMPIRAN -----	69
1. Daftar Risiko Prioritas-----	70
2. <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 Penyusunan KUA PPAS-----	71
3. <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 Penyusunan KUA PPAS-----	73
4. <i>Gender Analysis Pathway</i> (GAP) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 Penyusunan Perubahan KUA PPAS-----	77
5. <i>Gender Budget Statement</i> (GBS) Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 Penyusunan Perubahan KUA PPAS-----	79

DAFTAR TABEL

TABEL	Judul	Hal
2.1	Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023-----	6
2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan Daerah s/d Tahun 2023-----	11
2.3	Skala Nilai Peringkat Kinerja-----	20
2.4	Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023-----	21
2.5	Capaian Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah s/d tahun 2023-----	23
2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023-----	29
2.7	Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2025-----	35
2.8	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Purbalingga-----	47
3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021 – 2026-----	52
4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Daerah Tahun 2025 dan Renstra dan Prakiraan Maju Tahun 2026-----	57

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Renja Perangkat Daerah sifatnya lebih operasional dan merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan (Renstra SKPD). Hal tersebut sebagaimana di atur dalam pasal 126 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD di amanatkan bahwa Penyusunan Rencana Kerja disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Sebagai salah satu dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja mempunyai posisi strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);

- c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
- e. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6841)
- f. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6402);

- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6323);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165);
- m. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 10);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1781);
- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Prov. Jawa Tengah Tahun 2019 No. 5);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

- Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 05);
 - w. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 72);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
 - y. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 67);
 - z. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud

- a. Evaluasi kinerja program dan kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dengan Tujuan dan Sasaran dalam renstra Badan Keuangan Daerah;

1.3.2. Tujuan

- a. Menjabarkan Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026 ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025;

- b. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah
- 3.3. Program, dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra Badan Keuangan Daerah.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan pencapaian kinerja Renstra Badan Keuangan Daerah ditujukan untuk mengetahui capaian pelaksanaan dan realisasi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam Rencana Strategis, serta menginventarisir permasalahan yang di hadapi. Realisasi pelaksanaan Program / Kegiatan / Sub kegiatan Bakeuda pada Tahun 2023 sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Realisasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5	KEUANGAN	448,970,955,000	438,782,447,421	97.73
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	13,938,390,000	13,732,829,376	98.53
5.02.01.2.01	Perencanaan, Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,830,000	5,779,700	99.14
5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3,122,000	3,072,000	98.40
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2,708,000	2,707,700	99.99
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,911,003,000	11,763,820,260	98.76
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,679,393,000	11,542,729,416	98.83
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	126,310,000	116,167,044	91.97
5.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	105,300,000	104,923,800	99.64
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	19,400,000	19,389,800	99.95
5.02.01.2.03.06	Penatusahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	19,400,000	19,389,800	99.95
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	259,920,000	242,315,603	93.23
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	259,920,000	242,315,603	93.23
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	442,206,000	429,093,398	97.03

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,620,000	5,620,000	100.00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	176,782,000	173,089,088	97.91
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	13,800,000	13,579,310	98.40
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17,004,000	14,815,000	87.13
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	229,000,000	221,990,000	96.94
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	294,350,000	289,300,000	98.28
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Mesin dan Peralatan Lainnya	294,350,000	289,300,000	98.28
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	578,848,000	558,670,826	96.51
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	714,000	710,000	99.44
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	334,282,000	314,392,372	94.05
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	243,852,000	243,568,454	99.88
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	426,833,000	424,459,789	99.44
5.02.01.2.09.0002	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	274,382,000	274,356,089	99.99
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72,950,000	70,605,200	96.79
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	79,501,000	79,498,500	100.00
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	432,201,225,000	422,615,374,406	97.78
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	539,858,000	525,960,525	97.43
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	80,958,000	80,819,650	99.83
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	74,017,000	72,970,300	98.59

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	200,711,000	190,766,800	95.05
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	184,172,000	181,403,775	98.50
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	128,228,000	107,761,900	84.04
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	10,375,000	9,711,900	93.61
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	51,937,000	51,903,400	99.94
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Kerja sama dan Pemantauan Transaksi Non Tumai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	8,185,000	3,960,000	48.38
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10,375,000	10,296,600	99.24
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	47,356,000	31,890,000	67.34
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	127,931,000	127,098,925	99.35
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	127,931,000	127,098,925	99.35
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan	431,405,208,000	421,854,553,056	97.79

Kode Rekening	Uraian>Nama Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp	%
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Keuangan Daerah			
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	412,062,793,000	412,047,506,300	100.00
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9,701,947,000	423,658,756	4.37
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,640,468,000	9,383,388,000	97.33
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,458,591,000	1,168,485,195	80.11
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,458,591,000	1,168,485,195	80.11
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar harga	166,634,000	165,599,900	99.38
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	38,935,000	36,353,080	93.37
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	1,187,324,000	906,390,897	76.34
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	41,502,000	36,241,400	87.32
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	24,196,000	23,899,918	98.78
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,372,749,000	1,265,758,444	92.21
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	1,372,749,000	1,265,758,444	92.21
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24,901,000	24,193,200	97.16
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1,044,116,000	982,570,920	94.11
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	164,574,000	132,134,914	80.29
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	20,751,000	18,182,000	87.62
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	39,842,000	38,558,741	96.78
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	57,814,000	57,565,994	99.57
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	20,751,000	12,552,675	60.49

Secara umum gambaran pelaksanaan capaian program / kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Seluruh target kinerja yang direncanakan pada Tahun 2023 dapat tercapai;
2. Terdapat realisasi program / kegiatan yang jauh melebihi target kinerja yang direncanakan, yaitu :
 - Pertumbuhan Pajak Daerah terealisasi sebesar 9.03 persen dari target sebesar 4.5 persen.
 - Beberapa faktor yang mendukung pelampauan target tersebut adalah meningkatnya kualitas data wajib pajak, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta adanya inovasi kemudahan pelayanan pajak;
 - Kenaikan pendapatan bersumber dari pajak daerah, secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan;
3. Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk kedepannya adalah :
 - Meningkatkan kapasitas SDM utamanya SDM Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Penatausahaan Aset dan Penatausahaan Pendapatan Daerah. Tingginya dinamika pembangunan membutuhkan inovasi dan kreatifitas yang tinggi untuk meningkatkan kinerja Badan Keuangan Daerah;
 - Konsisten mengawal ketercapaian program / kegiatan dengan melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program / secara rutin dan berkala melalui sistem pengendalian Internal / SPIP;

Ringkasan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Bakeuda s/d Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)		
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
5.02	KEUANGAN										
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
		Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100	
		Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
		Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
		Persentase Pengadaan barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%	100
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%	100	100%	-	-	
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	-	-	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	21 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	20 Laporan	20 Laporan	500
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	83 Orang	77 Orang	77 Orang	77 Orang	100	77 Orang	77 Orang	92.77
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	148 Jumlah Kunjungan /Survey/ Koordinasi/ SPPD dalam dan luar daerah	44 Dokumen	24 Dokumen	49 Dokumen	204.17	40 Dokumen	40 Dokumen	27.03
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83 org/bln	13 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	100	13 Dokumen	13 Dokumen	-
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 orang	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100	4 laporan	4 laporan	-
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	70	70	100	20	20	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 bulan	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	-
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 bulan	5 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	1 Paket	-
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	5 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	-
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	8 Unit	8 Unit	8 Unit	13 Unit	163	8 Unit	8 Unit	-
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 bulan	50 Unit	51 Unit	51 Unit	100	11 Unit	11 Unit	-
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 bulan	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100	11 Unit	11 Unit	-
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12 bulan	2 Unit	8 Unit	8 Unit	100	2 Unit	2 Unit	-
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	89	87	88	88	100	89	89	100
		Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggung-jawaban APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Tepat Waktu	17 Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen	100	17 Dokumen	17 Dokumen	-
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	35878 Dokumen	49542 Dokumen	35778 Dokumen	46203 Dokumen	129.15	35878 Dokumen	35878 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	51 Dokumen	51 Dokumen	100	27 Dokumen	27 Dokumen	100
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	100
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	51 Orang	51 Orang	51 Orang	100	151 Orang	151 Orang	-
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100	100%	100%	100
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2 Dokumen	2 Dokumen	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	70 Orang	70 Orang	100	-	-	-
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	100%	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	-
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	5 Dokumen	5 Dokumen	100
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3 Dokumen	3 Dokumen	300
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	3 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	100	181 Laporan	181 Laporan	-
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengaman Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	1 Laporan	1 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12 Dokumen	12 Dokumen	-
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	-	-	70 Orang	70 Orang	100	175 Orang	175 Orang	-
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	4.75%	18.69%	4.50%	9.03%	210	4.75%	4.75%	100
		Cakupan data base yang valid	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.04.2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	614500 Laporan	623901 Laporan	614500 Laporan	631771 Laporan	102.8	614500 Laporan	614500 Laporan	100
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	-	614000 Dokumen	614000 Dokumen	100	614000 Dokumen	614000 Dokumen	100
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%	100	18	18	100
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Laporan	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	100	14 Laporan	14 Laporan	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2024	Realisasi Kinerja Hasil Program / Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan BAKEUDA Tahun 2023 (n-2)			Target Program / Kegiatan Renja BAKEUDA Tahun 2024 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra s/d Tahun 2024 (n-1)	
					Target	Realisasi	Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)*
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	18 Kegiatan, 3 Dokumen	26 Laporan	26 Laporan	100	26 Laporan	-	-
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	-	-	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	12 Laporan	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah.

Analisis kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki 2 Sasaran dan 4 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nomor 060/293 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga,

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 diukur dengan membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023. Hal tersebut mempedomani format Pengukuran Kinerja yang termuat dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PP Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, serta Permen PAN RP Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran, digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sesuai dengan Renstra Badan Keuangan Daerah Tahun 2016-2021, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Strategis Bakeuda yang:

- a) Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah;
- b) Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu;
- 2) Persentase laporan pengelolaan BMD yang disusun tepat waktu;
- 3) Presentase Kenaikan PAD;
- 4) Nilai SAKIP BAKEUDA

Hasil pengukuran kinerja IKU Bakeuda Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 2.4 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Pengukuran Kinerja Indikator Sasaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Rata-rata
			2023	2023	
1	Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang di tetapkan Tepat Waktu	100	100	100
		Presentase Kenaikan PAD	3.3	11.39	345.2
		Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusun tepat waktu	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	77	76.91	99.9
Kriteria Penilaian Realisasi			Sangat Tinggi		

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa capaian kinerja Indikator Kinerja Utama tersebut dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan berpredikat Sangat Baik.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga dan Renstra Badan Keuangan Daerah, dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan metode pengukuran sebagai berikut :

1) Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu.

Berdasarkan pasal 106 ayat (1) PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Sedangkan dalam Pasal 190 ayat (1) dinyatakan bahwa Laporan keuangan Pemerintah Daerah / LKPD disusun PPKD dan disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023 dapat tercapai 100%. Koordinasi yang baik dengan semua OPD menjadi kunci dalam penyusunan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang tepat waktu. Pencapaian target tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang mencakup kegiatan-kegiatan untuk mendukung penyusunan dokumen dimaksud dapat diselesaikan tepat waktu.

Indikator ketepatan waktu dalam penyusunan Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran merupakan sangat menunjang dalam rangka perwujudan tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Yang Efektif, Transparan Dan Akuntabel” dengan indikator “Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah / LKPD”.

LKPD merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan seluruh SKPD dan BLUD, sehingga berkualitas dan ketepatan waktu penyusunannya sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan APBD dan penyusunan LK SKPD pada semua SKPD. Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu menyampaikan LKPD kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah secara tepat waktu, dengan upaya mempercepat pengiriman LKPD setiap tahun. Berikut kami sajikan capaian indikator Tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu Status Opini BPK terhadap LKP pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5

Capaian Status Opini BPK terhadap Pemerintah Daerah s/d tahun 2023

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Capaian 2016-2021	Capaian 2022	Capaian 2023
Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Status Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP

Pada Tahun 2024, Status Opini BPK terhadap LKPD Pemkab Purbalingga Tahun Anggaran 2023 adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut merupakan pencapaian WTP yang kedelapan kalinya setelah sebelumnya memperoleh opini yang sama mulai 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut :

a) Evaluasi penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2023.

Evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja masing-masing SKPD dalam menyusun laporan keuangan, dimulai dari proses rekonsiliasi aset hingga pengiriman laporan keuangan SKPD kepada Bupati. Hasil evaluasi ini kemudian disampaikan kepada seluruh SKPD sebagai bahan evaluasi internal, guna mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2023 agar lebih baik dan tepat waktu.

Beberapa upaya yang dilakukan SKPD sehingga proses penyusunan LKPD dapat dilaksanakan lebih baik dan tepat waktu, antara lain :

- (1) Melakukan belanja tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dalam Anggaran Kas. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan SPM pada akhir tahun, yang berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran.
- (2) Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan (sebelum tanggal 31 Desember).
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara rutin mengajukan SP2B dalam rangka proses pengesahan pendapatan dan belanja BOS maupun BLUD.
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara periodik mengajukan SP2B/SP3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD.

- (5) Bendahara Penerimaan secara periodik melakukan penyetoran pendapatan asli daerah ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD dan melakukan entry data Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan.
- (6) Segera setelah tahun anggaran berakhir, SKPD agar melakukan stock opname terhadap seluruh persediaan yang dimiliki dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (Stock Opname).
- (7) Secara teratur melakukan proses entry jurnal manual ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan untuk transaksi sebagai berikut :
- Jurnal CTA Pendapatan BOS setiap semester
 - Jurnal CTA Belanja BOS setiap semester
 - Jurnal akrual Pendapatan BOS setiap semester
 - Jurnal akrual Belanja BOS setiap triwulan
 - Jurnal CTA Pendapatan BLUD setiap triwulan
 - Jurnal CTA Belanja BLUD setiap triwulan
 - Jurnal akrual Pendapatan BLUD setiap triwulan
 - Jurnal akrual Belanja BLUD setiap triwulan
- b) Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- Untuk memastikan pengelolaan keuangan BLUD dan BOS dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, telah dikembangkan dan diimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD dan BOS yang digunakan oleh seluruh BLUD dan sekolah Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

c) Rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset semester I Tahun 2023.

Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2023 dapat mengurangi beban kerja pada akhir tahun 2023 maupun awal tahun 2024, sehingga proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Selain itu, rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2023 dapat berfungsi sebagai media deteksi dini untuk permasalahan yang ada di SKPD, sehingga solusi terbaik dapat ditemukan lebih cepat.

d) Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD bagi bendahara pengeluaran dan pengurus barang.

Untuk tahun 2023 telah beberapa kali perubahan regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi Validasi serta Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020.

Dengan terbitnya regulasi baru di bidang pengelolaan keuangan daerah, pengelola keuangan termasuk di dalamnya penyusun laporan keuangan diberikan pemahaman yang memadai sehingga proses penatausahaan APBD sekaligus pelaporan dan pertanggungjawaban APBD dapat dilaksanakan dengan baik.

Salah satu dampak dari terbitnya regulasi tersebut adalah adanya perubahan mekanisme penyusunan laporan keuangan SKPD khususnya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Kecamatan Purbalingga, Kecamatan Kalimanah, dan Kecamatan Padamara, dimana SKPD tersebut harus mengkonsolidasikan laporan keuangan unit SKPD dibawahnya. Melalui bimbingan teknis dimaksud, pengelola keuangan dan penyusun laporan keuangan di 6 SKPD tersebut juga dibekali dengan pengetahuan seputar teknik rekonsiliasi keuangan dan aset maupun teknik konsolidasi laporan keuangan unit SKPD.

e) Kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan dan pengiriman LK SKPD 2023 antara lain:

- Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD
- Rekonsiliasi Keuangan dengan Sub Bidang Akuntansi
- Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD)

2) Persentase Kenaikan PAD.

Sesuai pasal 1 ayat (20) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari :

- (1) Pajak Daerah;
- (2) Retribusi Daerah;
- (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pajak daerah meliputi berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada individu atau badan usaha yang beroperasi dalam wilayah daerah, seperti pajak restoran, pajak hotel, dan pajak kendaraan bermotor. Retribusi, di sisi lain, merupakan pungutan yang dikenakan atas pelayanan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi izin. Hasil pengelolaan kekayaan daerah mencakup pendapatan dari aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti tanah, bangunan, dan investasi. Semua komponen ini menjadi penting karena PAD memberi fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Undang-undang ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan PAD, sehingga daerah tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, yang sering kali bersifat terbatas dan terikat pada program tertentu. Dalam rangka itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan inovasi dan strategi dalam memungut pajak dan retribusi, serta memperbaiki pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2022 juga mengatur tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PAD. Pemerintah daerah

diwajibkan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan PAD secara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan memberikan masukan terkait pemanfaatan dana tersebut. Dengan pengelolaan PAD yang baik dan akuntabel, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih berdaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat, serta mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan. Semua upaya ini penting untuk mewujudkan tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih efektif.

3) Persentase Laporan Pengelolaan BMD yang disusun Tepat Waktu.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah, bahwa Pelaporan merupakan kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh pengurus barang pembantu, pengurus barang pengguna dan pengurus barang pengelola, yang melakukan pentausahaan BMD pada kuasa pengguna barang, pengguna barang dan pengelola barang, penyusunan pelaporan BMD agar semua data dan informasi BMD dapat disajikan dengan akurat setiap bulan dan semester.

Adapun pembukuan dilakukan dengan mencatat seluruh barang milik daerah dalam sistem informasi akuntansi yang terintegrasi. Proses ini melibatkan pengidentifikasian barang, penentuan nilai aset, dan pengelompokan berdasarkan jenis dan fungsi. Setiap barang harus dicatat dengan detail yang mencakup deskripsi, nomor registrasi, lokasi, dan kondisi fisik. Pembukuan yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa semua aset dapat dipantau dan dikelola dengan efisien.

Selanjutnya, inventarisasi dilakukan secara berkala, yang bertujuan untuk memverifikasi keberadaan dan kondisi barang milik daerah. Proses ini mencakup pengecekan fisik terhadap barang dan membandingkan hasilnya dengan catatan yang ada. Inventarisasi ini biasanya dilakukan setiap tahun atau sesuai kebutuhan, dan melibatkan semua unit kerja terkait untuk memastikan bahwa setiap aset terdata dengan akurat. Hasil inventarisasi akan digunakan untuk mengidentifikasi barang yang perlu diperbaiki, dijual, atau dihapus dari daftar aset.

Setelah proses pembukuan dan inventarisasi, pelaporan menjadi langkah krusial dalam tata cara pengelolaan barang milik daerah. Laporan

disusun berdasarkan hasil pembukuan dan inventarisasi, dan harus mencakup informasi yang jelas mengenai jumlah, nilai, dan kondisi barang. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang, seperti kepala daerah dan badan pengawas, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang pengelolaan aset. Selain itu, laporan yang transparan juga penting untuk memenuhi regulasi yang ada dan mendukung akuntabilitas publik.

4) Nilai SAKIP BAKEUDA

Indikator ini untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP Badan Keuangan Daerah, berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Dalam kerangka SAKIP, nilai yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan pencapaian kuantitatif, seperti output dan outcome dari program, tetapi juga aspek kualitatif yang menunjukkan dampak dari kebijakan dan program terhadap masyarakat. Evaluasi SAKIP dilakukan melalui serangkaian indikator yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan, serta pelaporan hasil. Rencana kerja yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, di mana setiap instansi diharapkan untuk mencatat dan melaporkan progres kinerja secara berkala..

Selain itu, nilai SAKIP yang baik akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Masyarakat yang melihat adanya akuntabilitas dalam kinerja instansi cenderung lebih percaya bahwa pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka. Dengan mengimplementasikan SAKIP secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas layanan publik, menciptakan efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta mendorong tercapainya tujuan pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif..

Adapun pencapaian kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2023

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasiona l	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
1	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
3	Persentase Kenaikan PAD	%	-	-	2	2	2	2	11.39	-	2	2	
4	Persentase Laporan pengelo-laan BMD yang disusun tepat waktu	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
5	Nilai SAKIP BAKEUDA	Angka	-	-	70,27	71,27	71,27	72,27	76.91	76.96	77	77	
6	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
7	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	%	-	-	88	89	90	91	88	-	90	91	
8	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
9	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu	-	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
10	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	Rekemondasi	-	-	5	4	5	5	5	-	5	5	

No	Indikator	Satuan	SPM/ Standar Nasiona I	IKK	Target RENSTRA				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
					Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	13
11	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	%	-	-	4,5	4,75	5	5	9.03	-	5	5	
12	Cakupan data base yang valid	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
13	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
14	Presentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
15	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
16	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
17	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
18	Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
19	Presentase Pengadaan barang Milik Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	
20	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	%	-	-	100	100	100	100	100	-	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah.

Permasalahan dan hambatan yang di hadapi dalam menyelenggarakan tugas dan dampak yang dapat terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sering berubah-ubah dan terlambatnya kebijakan pemerintah pusat yang mengatur tentang penganggaran dan alokasi Transfer Keuangan Daerah, menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran daerah;
2. Masih ada personil SKPD yang kurang memahami terkait anggaran berbasis kinerja, serta masih terdapat kekurangkonsistenan antara dokumen perencanaan dan penganggaran pada SKPD;
3. Masih ada pengelola keuangan desa yang belum memahami mekanisme penyaluran dana transfer, sehingga mengakibatkan penyaluran belanja transfer tidak tepat waktu.;
4. Adanya penyesuaian regulasi dalam penatausahaan keuangan daerah (SIPD, PAPERLES, LAPORAN KEUANGAN, KKPD), yang berdampak terganggunya proses penatausahaan keuangan daerah;
5. Data objek /subyek/wajib Pajak belum sepenuhnya valid, masih kurangnya pemahaman kewajiban perpajakan, dan belum taatnya wajib pajak berdampak target pajak belum sesuai dengan potensi;
6. Adanya perubahan regulasi perpanjakan daerah yang berdampak pada penyesuaian aplikasi dan prosedur pemungutan pajak, sehingga menghambat realisasi pajak dan meningkatkan piutang pajak daerah;
7. Masih terdapat personil OPD yang memiliki keterbatasan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga berdampak kualitas LK-SKPD Kurang memadai / tidak sesuai standar, dan masih ditemukan adanya temuan berulang pada LHP atas LKPD;
8. Keterbatasan keandalan aplikasi SIPD RI dapat memengaruhi kualitas informasi dan laporan keuangan, hal ini berdampak Pengambilan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan belum sepenuhnya berbasis data
9. keterbatasan SDM SKPD dalam menyelesaikan Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan Laporan BMD, serta pelaksanaan inventarisasi BMD berdasarkan Permendagri 47 tahun 2021, hal ini berdampak

keterlambatan dalam menyelesaikan Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan Laporan BMD;

10. Perubahan regulasi SHS dan ASB dapat mengganggu penyusunan rencana kerja anggaran, berdampak penyusunan anggaran menjadi tidak efisien;
11. Pengguna Barang belum sepenuhnya paham terkait pengamanan aset yang menjadi tanggungjawabnya, hal ini berdampak terjadi risiko penyalahgunaan aset, baik oleh internal maupun pihak eksternal.
12. Pencatatan Aset yang belum tertib, hal ini berdampak berisiko kehilangan atau mengalami kerusakan

Dari hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu-isu strategis diatas, Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Badan Keuangan Daerah pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan SIPD menuntut SDM harus lebih meningkatkan kompetensi dalam menguasai IT serta harus lebih komunikatif dengan Pusdatin
2. Menuntut pemahaman dan updating terhadap penyesuaian-penyesuaian regulasi.
3. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021 menuntut Pemahaman regulasi dan Keterampilan Pengguna terhadap cara kerja sistem tersebut
4. Data objek pajak belum valid memerlukan pengembangan dalam teknologi yang mendukung integrasi data, peningkatan koordinasi lintas instansi, serta program edukasi untuk masyarakat agar melaporkan perubahan yang relevan dengan objek pajak mereka.
5. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah membutuhkan pendekatan terpadu, termasuk sosialisasi yang intensif, sistem perpajakan yang muda, serta koordinasi yang lebih baik antara pemerintah daerah dan pusat dalam merumuskan serta menyosialisasikan peraturan baru

Dalam menghadapi tantangan tersebut, terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan. Adapun peluang yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Dengan penerapan UU nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, membuka peluang *local tax power* bagi Pemda untuk meningkatkan PAD dari sektor pajak melalui opsen pajak

2. Dengan pemberlakuan SIPD, proses penatausahaan menjadi lebih efektif dan memungkinkan terintegrasi dengan SIKD
3. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri No. 47 Tahun 2021, dapat mempermudah penyelesaian Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan pelaporan BMD
4. Penggunaan multikanal pembayaran pajak serta pemasangan alat tapping device, dapat memudahkan dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan pemasukan pajak

Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan pemahaman SKPD terhadap anggaran kinerja serta melakukan Konsolidasi penyusunan anggaran dan perencanaan
2. Koordinasi perencanaan anggaran
3. Koordinasi penyaluran belanja transfer dengan desa dan SKPD terkait
4. penyesuaian regulasi penatausahaan keuangan daerah
5. Perlu dilakukan pemuktahiran Data Objek Pajak dan Sosialisasi Pajak Daerah
6. Penagihan dan pemeriksaan pajak serta pelaksanaan Opsen Pajak daerah
7. Menyusun program pembinaan yang terstruktur dan sistematis bagi Penyusun Laporan Keuangan serta Menciptakan instrumen untuk menilai kualitas pengelolaan keuangan SKPD yang meliputi seluruh aspek (penganggaran, penatausahaan, aklap, temuan pemeriksaan).
8. Menyusun database keuangan daerah yang regional dan Mendorong pembentukan Bakeuda sebagai learning organization antara lain melalui pembuatan artikel ilmiah sederhana bidang keuangan daerah
9. Melakukan Pembinaan dan pelatihan serta Monitoring dan Evaluasi terkait Pengelolaan BMD secara periodik yang bersifat menyeluruh pada tingkat Pengguna Barang
10. melakukan pengujian yang berbasis partisipasi OPD agar didapatkan output Perbup SHS yang reliable sebagai antisipasi Perubahan Perbup SHS dikemudian hari.
11. Melakukan pembinaan terkait tugas dan tanggung jawab pengamanan aset yang ada di SKPD serta pengamanan aset baik secara hukum, administrasi dan fisik

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penelaahan terhadap RKPD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Melakukan identifikasi terhadap program dan kegiatan prioritas Badan Keuangan Daerah yang tercantum dalam RKPD 2025. Proses ini bertujuan untuk memahami fokus utama yang akan menjadi perhatian dalam perencanaan anggaran dan kegiatan.
- 2) Membandingkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi dengan hasil rumusan kebutuhan berdasarkan analisis dari tahap-tahap sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dan relevan dengan situasi yang ada.
- 3) Menyajikan hasil perbandingan tersebut disajikan dalam bentuk matriks. Dalam matriks ini, program dan kegiatan yang sama ditempatkan pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis. Penyajian ini membantu tim dalam melihat keselarasan antara program yang ada dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi.
- 4) Memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan di Badan Keuangan Daerah merupakan kegiatan lanjutan atau prioritas yang sudah termuat dalam RKPD tahun 2024. Ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
- 5) menyusun rumusan kebutuhan untuk setiap program dan kegiatan hasil reviu terhadap RKPD. Rumusan ini mencakup informasi penting seperti lokasi, indikator kinerja, besaran target atau tolok ukur, serta estimasi dana yang dibutuhkan untuk setiap program dan kegiatan yang direncanakan.

Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 bertujuan untuk penyempurnaan dokumen perencanaan yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Berikut kami tampilkan Tabel 2.7 yang merangkum hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025.

Tabel 2.7

Reviu Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemkab PBG	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	13,938,390,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemkab PBG	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	100%	18,474,841,975			
			Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	100%					Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti		100%		
			Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%					Persentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100%		
			Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%					Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan		100%		
			Persentase Pengadaan barang Milik Daerah	100%					Persentase Pengadaan barang Milik Daerah		100%		
			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%					Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah		100%		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	100%	5,830,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	100%	18,800,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	3,122,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	6,600,000	
1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	2,708,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 Laporan	12,200,000	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	11,911,003,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	14,922,919,975	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	11,679,393,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	77 Orang	14,492,529,975	
2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	126,310,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	128,119,000	
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	105,300,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13 Dokumen	302,271,000	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	19,400,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	100%	25,800,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	19,400,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25,800,000	
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	259,920,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50,000,000	
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemkab PBG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	259,920,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemkab PBG	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20 Orang	50,000,000	
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	442,206,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemkab PBG	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	100%	853,896,000	
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,620,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5,500,000	
5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	176,782,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	202,976,000	
5.3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	13,800,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	22,000,000	
5.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	17,004,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	28,420,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	229,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	595,000,000	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	294,350,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	276,300,000	
6.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	26 Unit	294,350,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	26 Unit	276,300,000	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	578,848,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,240,280,000	
7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	714,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,892,000	
7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	334,282,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	458,700,000	
7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	243,852,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	779,688,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	426,833,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	1,086,846,000	
8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemkab PBG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	274,382,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemkab PBG	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	225,780,000	
8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	72,950,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit	47,275,000	
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	79,501,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemkab PBG	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	813,791,000	
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemkab PBG	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100%	418,215,388,000	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Pemkab PBG	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	100%	417,853,852,000	
		Pemkab PBG	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	89%			Pemkab PBG	Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	90%		
		Pemkab PBG	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu			Pemkab PBG	Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Tepat Waktu		
		Pemkab PBG	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu			Pemkab PBG	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Tepat Waktu		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemkab PBG	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	100%	539,858,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Pemkab PBG	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu	100%	647,136,000	
1.1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	80,958,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	84,347,000	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	74,017,000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	78,093,000	
1.3	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	200,711,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	284,094,000	
1.4	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	184,172,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	200,602,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemkab PBG	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	100%	128,228,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pemkab PBG	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	100%	229,000,000	
2.1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17 Dokumen	10,375,000	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	17 Dokumen	25,000,000	
2.2	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	102 Dokumen	51,937,000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	102 Dokumen	104,000,000	
2.3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27 Dokumen	8,185,000	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	27 Dokumen	25,000,000	
2.4	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	10,375,000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	25,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	604 Orang	47,356,000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	604 Orang	50,000,000	
II.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100%	127,931,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	100%	306,900,000	
3.1	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	127,931,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	126,000,000	
3.2	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	0	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45 Orang	180,900,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
II.4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	417,419,371,000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Pemkab PBG	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	100%	416,670,816,000	
4.1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	405,778,903,000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	403,345,228,000	
4.2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	2,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	4,000,000,000	
4.3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	9,640,468,000	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	2 Laporan	9,325,588,000	
III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pemkab PBG	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	4 Dokumen	1,458,591,000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pemkab PBG	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	4 Dokumen	2,759,308,000	
III.1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100%	1,458,591,000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	100%	2,759,308,000	
1.1	Penyusunan Standar Harga	Pemkab PBG	Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang Disusun	3 Dokumen	166,634,000	Penyusunan Standar Harga	Pemkab PBG	Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang Disusun	3 Dokumen	298,622,000	
1.2	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	181 Laporan	38,935,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	181 Laporan	94,626,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan PengamanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	1,187,324,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan PengamanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Laporan	1,764,075,000	
1.4	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	41,502,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	69,029,000	
1.5	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175 Orang	24,196,000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	175 Orang	100,000,000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pemkab PBG	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	4.75%	1,372,749,000	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pemkab PBG	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	5%	3,150,461,400	
		Pemkab PBG	Cakupan data base yang valid	100%			Pemkab PBG	Cakupan data base yang valid	100%		
IV.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pemkab PBG	Realisasi PAD	100%	1,372,749,000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (P4)	Pemkab PBG	Realisasi PAD	100%	3,150,461,400	
1.1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	24,901,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	12 Laporan	150,000,000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1,044,116,000	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	12 Laporan	1,251,479,000	
1.3	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	164,574,000	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	203,570,400	
1.4	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48 Layanan	20,751,000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	48 Layanan	65,000,000	
1.5	Penagihan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen	39,842,000	Penagihan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	14 Dokumen	1,400,000,000	
1.6	-	-	-	-	0	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	36 Dokumen	200,000,000	
1.7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	26 Laporan	57,814,000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	26 Laporan	63,811,000	
1.8	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	20,751,000	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Pemkab PBG	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	4 Laporan	16,601,000	
Jumlah Total					434,985,118,000	Jumlah Total					442,238,463,375

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan yang partisipatoris, maka Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah juga mempertimbangkan dan memverifikasi usulan-usulan dari pemangku kepentingan baik dari warga masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan.

Pada tahap pengumpulan aspirasi dilakukan di tingkat desa atau kelurahan, masyarakat, organisasi masyarakat, dan perangkat desa mengusulkan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka, seperti pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, atau fasilitas publik lainnya. Usulan-usulan ini kemudian dibahas dalam Musrenbang desa atau kelurahan untuk menentukan prioritas kebutuhan yang paling mendesak.

Selanjutnya, usulan yang telah disaring dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan. Usulan dari desa dalam satu kecamatan digabungkan dan dievaluasi untuk melihat mana yang menjadi prioritas dan layak diajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah itu, usulan yang masih relevan akan dibahas lagi di tingkat kabupaten atau kota agar disesuaikan dengan rencana pembangunan yang lebih luas. Jika ada usulan yang dianggap memiliki dampak lebih besar, usulan tersebut dapat dibawa hingga ke tingkat provinsi dan nasional. Setelah semua usulan dibahas pada setiap tingkatan, pemerintah menetapkan rencana pembangunan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Keuangan Daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mendukung prioritas pembangunan dan stabilitas keuangan daerah. Melalui Bakeuda, pemerintah daerah mengelola anggaran dan memastikan bahwa setiap program yang disetujui selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Usulan-usulan Musrenbang yang diprioritaskan Bakeuda akan diarahkan untuk menjawab isu-isu utama, baik dari segi peningkatan ekonomi, stabilitas fiskal, maupun peningkatan daya saing lokal.

Usulan Musrenbang yang sejalan dengan tugas pokok Bakeuda memfokuskan pada kegiatan yang dapat menjadi pendorong ekonomi dan pemerintahan desa, seperti pengembangan infrastruktur, pengembangan

pariwisata, dan pemberdayaan UMKM serta prioritas lain sesuai dengan kebutuhan desa.

Selain itu, usulan Musrenbang yang disetujui juga harus mendukung pengembangan sektor unggulan daerah. Setiap daerah memiliki potensi sektor unggulan yang berbeda, seperti pertanian, perikanan, atau industri kreatif. Bakeuda berperan dalam mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan sektor-sektor ini, karena sektor unggulan tidak hanya memberikan pendapatan tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional.

Diharapkan usulan yang terpilih tidak hanya mendukung pembangunan fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini menjadikan usulan Musrenbang sebagai pendorong yang kuat dalam pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor-sektor yang potensial di daerah. Dengan demikian, Bakeuda berfungsi sebagai pengarah utama agar setiap program pembangunan yang direncanakan efektif, efisien, dan memberi dampak positif bagi ekonomi lokal. Berikut jumlah Usulan Masyarakat / Desa / Lembaga pada Musrenbang yang masuk ke Badan Keuangan Daerah yang disajikan dalam table 2.8.

Tabel 2.8
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Purbalingga

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Besaran / Volume
(1)	(2)	(4)	(5)
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	411,918,217,000
	a. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	% Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	411,918,217,000
	(1). Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	402,329,777,000
	(2). Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	9,588,440,000

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional terkait hubungan antara Badan Keuangan Daerah dengan Kementerian Keuangan sangat penting dalam upaya menciptakan koordinasi fiskal yang efektif dalam menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah dengan standar nasional.

Adapun Visi dari Kementerian Keuangan adalah “Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “

Adapun Misi Kementerian Keuangan adalah :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dari Visi dan Misi Kementerian Keuangan diatas terhadap tujuan pertama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel“ dalam telaahannya dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah telah sejalan, dimana tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga menekankan pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Keduanya memiliki kesamaan dalam prinsip tata kelola keuangan yang baik, yaitu efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas, yang berperan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi secara nasional maupun di tingkat daerah. Dengan sinergi ini, visi nasional dapat diterjemahkan dan diterapkan secara optimal di tingkat daerah untuk kesejahteraan bersama.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Keuangan Daerah

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga, maka Badan Keuangan Daerah mendukung untuk mewujudkan visi tersebut yaitu :

“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKHLAK MULIA“

Dari visi tersebut dapat di jabarkan sebagai berikut :

1. Purbalingga yang Mandiri.

Purbalingga yang memiliki kemampuan mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Termasuk didalamnya adalah secara bertahap ketergantungan Purbalingga terhadap pihak-pihak lain semakin dapat dikurangi. Mewujudkan Purbalingga yang mandiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari cita-cita mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berdaulat dalam bidang politik diwujudkan dalam pembangunan demokrasi politik yang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Sedangkan berdikari dalam ekonomi, diwujudkan dalam pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional. Berkepribadian dalam kebudayaan, diwujudkan melalui pembangunan karakter dan kegotongroyongan yang berdasar pada realitas kebhinekaan sebagai kekuatan potensi bangsa dalam mewujudkan implementasi demokrasi politik dan ekonomi Indonesia masa depan..

2. Purbalingga yang Berdaya Saing

Purbalingga yang mampu bertahan bahkan sebisa mungkin mampu memenangkan pertarungan dalam kompetisi dan persaingan global. Daya saing masyarakat dan daerah perlu dibangun secara sungguh-sungguh dalam menghadapi persaingan global yang semakin berat, yang antara lain ditandai dengan diberlakukannya perdagangan bebas. Optimalisasi keunggulan komparatif yang dimiliki serta upaya mendorong peningkatan

keunggulan kompetitif melalui peningkatan kapasitas pemerintah daerah serta penguatan dunia usaha mutlak diperlukan.

3. Purbalingga yang Sejahtera

Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri. Purbalingga yang masyarakatnya telah dapat terpenuhi kebutuhan dan harkat martabat hidupnya secara layak, baik yang bersifat fisiologis dan material maupun yang bersifat batiniah seperti ketenteraman, rasa aman, kebersamaan dan cinta kasih serta kebutuhan aktualisasi diri.

4. Berakhlak Mulia

Bahwa masyarakat sejahtera yang ingin diwujudkan harus diimbangi dengan kualitas moral spiritual masyarakat yang tinggi. Kemajuan yang ingin dicapai tidak hanya dalam dimensi ekonomi-material semata, namun juga mencakup dimensi mental-spiritual dan kultural, agar terwujud kehidupan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin..

Dalam mencapai visi pembangunan daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat;
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT / Tuhan YME, serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan terciptanya rasa aman dan tenteram dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;

5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha investasi dan penciptaan lapangan kerja;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa;
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah / Infrastruktur dengan tetap memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Dari ke tujuh misi tersebut Badan Keuangan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2022, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, telah mendukung misi ke satu yaitu ***“Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat “***. Tujuan jangka menengah yang ingin dicapai dari misi ke satu tersebut adalah Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

Dengan mengacu pada tujuan sasaran dalam RPJMD tersebut diatas, maka disusun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah beserta indikator kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026, adapun indikator kinerja tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 0008/178 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/293 tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga Dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tahun 2021 – 2026

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Strategis						Realisasi Kinerja Sasaran			Target Akhir Renstra
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023		
A	Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Presentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang di tetapkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Presentase Kenaikan PAD	%	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3.3	2
		Persentase laporan pengelolaan barang milik daerah yang disusn tepat waktu	-	-	-	100	100	100	100	-	-	100	100	100
B	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Bakeuda	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	Angka	-	-	44	45	46	47	-	43	44	47	
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	%	69,27	70,27	70,77	71,27	71,77	72,27	68.76	76.01	76.91	72,27	

3.2. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2025 Badan Keuangan Daerah akan menjalankan empat program, empat belas kegiatan dan empat puluh enam sub kegiatan, yaitu sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

1.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

1.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Fasilitas Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

1.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

1.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS.
2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.
3. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.
4. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD.

2.2. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

1. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah.
2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD.
3. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
4. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan.
5. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

2. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota.

2.4. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan.
2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak.
3. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

3.1. Pengelolaan Barang Milik Daerah

1. Penyusunan Standar Harga.
2. Penatausahaan Barang Milik Daerah.
3. Pengamanan Barang Milik Daerah.
4. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
5. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.
2. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.
3. Penetapan Wajib Pajak Daerah.
4. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah.
5. Penagihan Pajak Daerah.
6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
8. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEUANGAN DAERAH

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah menyusun program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif dalam Renstra 2021-2026. Proses ini mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah, sambil tetap berpegang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga.

Program dapat diartikan sebagai instrumen kebijakan yang mencakup satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Program ini merupakan wujud implementasi dari strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu. Sementara itu, kegiatan adalah penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang menjadi arah pencapaian visi dan misi organisasi.

Perencanaan kinerja akan diukur melalui kegiatan yang dievaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja ini harus mencerminkan berbagai aspek, termasuk input, output, outcome, dan impact, yang sesuai dengan sasaran, rencana program, dan kegiatan yang telah dirumuskan. Untuk meningkatkan pencapaian kinerja di bidang keuangan, program-program yang dilaksanakan harus mengakomodasi prinsip kesetaraan dan keadilan bagi semua stakeholder atau pemangku kepentingan. Dengan mengikuti prinsip tersebut, diharapkan hasil pengelolaan keuangan, Barang Milik Daerah (BMD), dan pendapatan daerah yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah dapat memberikan nilai tambah. Hal ini penting agar pengambil kebijakan dapat membuat keputusan yang tepat dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 yang dapat di lihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan laporan capaian kinerja	Pemkab PBG	100	%	13,873,878,000			100	%	17,953,945,975
		Presentase Temuan Pengelolaan Anggaran yang ditindaklanjuti	Pemkab PBG	100	%				100	%	
		Presentase Ketersediaan Layanan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	100	%				100	%	
		Presentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Pemkab PBG	100	%				100	%	
		Presentase Pengadaan barang Milik Daerah	Pemkab PBG	100	%				100	%	
		Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	100	%				100	%	
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dok Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Pemkab PBG	100	%	3,652,000			100	%	19,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok Perencanaan Perangkat Daerah	Pemkab PBG	1	Dok	1,992,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		1	Dok	7,600,000
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pemkab PBG	20	Laporan	1,660,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		20	Dok	12,200,000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	Pemkab PBG	100	%	12,602,444,000			100	%	15,062,919,975
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pemkab PBG	77	Orang	12,450,845,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		77	Orang/bu lan	14,592,529,975
5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dok Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Pemkab PBG	40	Dok	67,359,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		40	Dok	158,119,000
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dok Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pemkab PBG	13	Dok	84,240,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		13	Dok	312,271,000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Aset Milik Daerah Sesuai Ketentuan	Pemkab PBG	100	%	15,520,000			100	%	30,800,000
5.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pemkab PBG	4	Laporan	15,520,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		4	Laporan	30,800,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemkab PBG	100	%	4,000,000			100	%	70,000,000
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pemkab PBG	20	Orang	4,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		20	Orang	70,000,000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum penunjang operasional kantor	Pemkab PBG	100	%	311,478,000			100	%	994,896,000
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	1	Paket	1,660,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		1	Paket	6,500,000
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	1	Paket	141,426,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		1	Paket	282,976,000
5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan TamU	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan TamU	Pemkab PBG	12	Laporan	6,640,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	32,000,000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemkab PBG	12	Laporan	21,652,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	38,420,000
5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dok Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pemkab PBG	2	Dok	140,100,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Dok	635,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	100	%	1,000,000			100	%	292,300,000
5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Pemkab PBG	8	Unit	1,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		37	Unit	292,300,000
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemkab PBG	100	%	660,303,000			100	%	1,291,280,000
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemkab PBG	12	Laporan	572,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	2,892,000
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pemkab PBG	12	Laporan	313,075,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	488,700,000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pemkab PBG	12	Laporan	346,656,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	799,688,000
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	100	%	275,481,000			100	%	1,186,846,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pemkab PBG	11	Unit	218,704,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		11	Unit	275,780,000
5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemkab PBG	11	Unit	12,376,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		11	Unit	57,275,000
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas i	Pemkab PBG	2	Unit	44,401,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Unit	853,791,000
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD	Pemkab PBG	100	%	414,771,640,000			100	%	463,511,907,90 0
		Tingkat kepuasan pengguna pelayanan perbendaharaan	Pemkab PBG	89	%				90	%	
		Tingkat ketepatan waktu penyusunan pertanggungjawaban APBD	Pemkab PBG	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	
		Tingkat Ketepatan Waktu Penyaluran Dana Transfer dan BTT	Pemkab PBG	Tepat Waktu	Tepat Waktu				Tepat Waktu	Tepat Waktu	
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada	Pemkab PBG	100	%	647,136,000			100	%	827,936,900

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		APBD Perubahan tepat Waktu									
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dok KUA dan PPAS yang Disusun	Pemkab PBG	2	Dok	84,347,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Dok	163,150,600
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dok Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Pemkab PBG	2	Dok	78,093,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Dok	124,340,300
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	2	Dok	284,094,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Dok	282,894,000
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dok Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	2	Dok	200,602,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Dok	257,552,000
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase pelayanan penerbitan SP2D dan SPD	Pemkab PBG	100	%	108,887,000			100	%	382,346,000
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan	Pemkab PBG	17	Dok	8,300,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		17	Dok	40,974,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
		Pengelolaan Kas Daerah									
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dok Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Pemkab PBG	35878	Dok	34,530,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		35978	Dok	176,626,000
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dok Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pemkab PBG	27	Dok	9,960,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		27	Dok	37,500,000
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dok Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Pemkab PBG	1	Dok	8,300,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		1	Dok	47,500,000
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	151	Orang	47,797,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		151	Orang	79,746,000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang disusun tepat waktu	Pemkab PBG	100	%	97,400,000			100	%	655,515,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dok Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	2	Dok	96,400,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		2	Dok	457,195,000
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	45	orang	1,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU				198,320,000
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terlaksana tepat waktu dan sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%	413,918,217,000			100	%	461,646,110,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Pemkab PBG	12	Laporan	402,329,777,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU, DANA DESA, BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI		12	Laporan	435,812,060,000
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Pemkab PBG	12	Laporan	2,000,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	16,400,000,000
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	2	Laporan	9,588,440,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		2	Laporan	9,434,050,000
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rekomendasi Kebijakan Teknis Keuangan Bidang Aset Daerah	Pemkab PBG	4	Dok	625,676,000			5	Dok	2,843,308,000
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yang mengelola aset sesuai ketentuan	Pemkab PBG	100	%	625,676,000			100	%	2,843,308,000
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Buku Standar Satuan Harga yang Disusun	Pemkab PBG	3	Dok	166,634,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		3	Dok	443,330,000
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dok Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	181	Laporan	22,692,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		181	Laporan	132,580,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan PengamanHasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	12	Laporan	363,868,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	1,836,788,000
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dok Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemkab PBG	12	Dok	51,525,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Dok	237,400,000
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemkab PBG	175	orang	20,957,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		175	orang	193,210,000
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase pertumbuhan Pajak Daerah	Pemkab PBG	4.75	%	1,456,443,000			5	%	2,376,035,000
		Cakupan data base yang valid	Pemkab PBG	100	%				100	%	
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi PAD	Pemkab PBG	100	%	1,456,443,000			100	%	2,376,035,000
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Pemkab PBG	12	Laporan	65,260,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		12	Laporan	98,575,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2026			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
	2	3	4	5		6	7	8	9		10
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Pemkab PBG	614500	Laporan	1,032,091,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		614500	Laporan	1,457,319,000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dok Ketetapan Pajak Daerah	Pemkab PBG	614000	Dok	164,680,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		614000	Dok	205,000,000
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Pemkab PBG	100%	Layanan	50,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		100%	Layanan	100,000,000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Pemkab PBG	14	Dok	64,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		14	Dok	245,141,000
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dok Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Pemkab PBG	36	Dok	1,000,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		36	Dok	200,000,000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Pemkab PBG	26	Laporan	63,811,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		26	Laporan	185,000,000
5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Pemkab PBG	4	Laporan	16,601,000	DANA TRANSFER UMUM-DAU		4	Laporan	85,000,000
						430,727,637,000					486,685,196,875

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan kedepan, terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mempertegas kewenangan pemungutan pajak di wilayah Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak melalui opsen pajak;
2. Penggunaan aplikasi Sistem Manajemen Aset (Simaset) berbasis Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dapat mempermudah penyelesaian Rekonsiliasi BMD, penyusunan RKBMD, dan pelaporan BMD;
3. Penggunaan multikanal pembayaran pajak serta pemasangan alat tapping device, dapat memudahkan dalam pembayaran pajak serta mengoptimalkan pemasukan pajak;
4. Dengan pemberlakuan SIPD, proses penatausahaan menjadi lebih efektif dan memungkinkan terintegrasi dengan SIKD;

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan perencanaan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, baik dari aspek kebijakan, pendanaan, hingga sumber daya manusia, guna memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal.

Purbalingga, Juli 2024,

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



SISWANTO, S.Pt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197205271998031005

LAMPIRAN

Kertas Kerja
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemda	: Kabupaten Purbalingga
Tahun Penilaian	: 2024
Tujuan Strategis	: 1. Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, Transparan dan Akuntabel 2. Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Bakeuda
Urusan Pemerintahan	: Keuangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis Badan Keuangan					
1	Pencatatan dan pelaporan keuangan dan aset yang belum memadai dan akurat	RSO.2024.37.24.01	12	Kepala Badan	Sistem kontrol internal belum memadai untuk memastikan rincian, penilaian dan data dukung keuangan dan aset yang benar dan akurat	Keputusan yang tidak tepat berdasarkan informasi keuangan yang tidak akurat atau tidak lengkap
2	Dokumen Penganggaran dan Pertanggungjawaban tidak sesuai dengan persyaratan regulasi	RSO.2024.37.24.02	9	Kepala Badan	Kurang memahami standar akuntansi pemerintah	Dapat mengarah pada kesalahan pengambilan keputusan dalam penganggaran, belanja, serta kebijakan
3	Berpotensi Terjadinya penyalahgunaan aset daerah	RSO.2024.37.24.03	12	Kepala Badan	Pengendalian internal yang tidak memadai memungkinkan terjadinya penyalahgunaan	Kerugian finansial yang signifikan bagi pemerintah daerah
4	Indikasi manipulasi pelaporan dan pencatatan pendapatan daerah	RSO.2024.37.24.04	12	Kepala Badan	Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif dan kontrol yang lemah terhadap pencatatan dan pelaporan pendapatan	Kebocoran pendapatan karena tidak tercatat dengan benar atau karena adanya praktik manipulatif
5	Penilaian Mandiri SPIIP tidak dilaksanakan Tepat Waktu	RSO.2024.37.24.05	12	Kepala Badan	Kesulitan dalam mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan memberikan umpan balik	Terhambatnya proses perbaikan dan pengembangan kinerja instansi pemerintah
6	Menghambat kemampuan instansi pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan	RSO.2024.37.24.06	12	Kepala Badan	Praktik penyimpangan dan pengalihan sumber daya dan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan	Pembangunan yang tidak merata akibat pengalihan sumber daya dan dapat menghambat pertumbuhan perekonomian
II	Risiko Operasional Badan Keuangan					
1	Pencatatan dan Pelaporan BMD tidak memadai dan tidak dapat di yakini keberadaannya	ROO.2024.37.24.18	9	Kasubid Penatausahaan Aset	Kurangnya pemahaman tentang tatacara pelaporan dan pencatatan BMD	Membuka celah bagi penyalahgunaan aset daerah untuk digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya
2	Wajib pajak menunggak pajak	ROO.2024.37.24.23	12	Kasubid Penagihan, Penerimaan dan Pemeriksaan	Keberatan atas pajaknya, jika wajib pajak perusahaan dipengaruhi oleh kondisi keuangan perusahaan, rendahnya kesadaran wajib pajak	Penerimaan PAD berkurang, masyarakat kurang sadar tentang pajak

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko prioritas
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)
- Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b
- Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

Kabupaten Purbalingga, 2024
Kepala Badan Keuangan Daerah

[Signature]
SISWANTO, S.Pt., M.Si.
NIP. 197205271998031005

Matriks Lembar Kerja
 Gender Analysis Pathway (GAP) Badan Keuangan Daerah
 Kabupaten Purbalingga
 Tahun 2025

BARIS 1	URUSAN		Penunjang Pemerintahan
	NAMA OPD		Badan Keuangan Daerah
	PROGRAM		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	KEGIATAN		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	SUB KEGIATAN		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Jumlah RKA (n+2) OPD yang Telah dilampirkan Anggaran Responsif Gender Dinas/Badan = 27 Kecamatan = 18
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	"Kontrol: Meskipun dalam penyusunan PPRG telah dilaksanakan, peninjauan terhadap kualitas dokumen GAP dan GBS belum pernah dilakukan" Belum adanya aturan dari Kepala Daerah maupun Sekretariat Daerah yang mengamanatkan pelampiran GAP dan GBS dalam proses penyusunan PPRG
		Sebab Kesenjangan Internal	Pemahaman terhadap pentingnya PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran belum melembaga di tingkat Bakeuda dan TAPD sehingga belum menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Belum dipahaminya mekanisme penyusunan GAP dan GBS oleh OPD
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan kualitas Dokumen yang Responsif Gender
BARIS 5	RENCANA AKSI		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penelaahan RKA 2. Rapat Koordinasi Internal bersama dengan TAPD tentang mekanisme PPRG dan pentingnya dalam perencanaan penganggaran 3. Pelaksanaan Evaluasi RKA 4. Monitoring dan Evaluasi

BARIS 6	BASELINE DATA	Jumlah RKA (n+2) OPD yang Telah dilampirkan Anggaran Responsif Gender Dinas/Badan = 27 Kecamatan = 18
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan Indikator Kinerja: 1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun PPAS yang Disusun Target Kinerja: 2 Dokumen
Immediate Outcome/Kegiatan		Indikator Kinerja: - Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu Target Kinerja: - 100 %
Intermediate Outcome/Program		Indikator Kinerja: - Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD Target Kinerja : - 100 %
Optimum Outcome/Sasaran		Indikator Kinerja: - Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu Target Kinerja: - 100 %
Dampak/Tujuan		Indikator Kinerja: - Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Target Kinerja: - Opini WTP

Purbalingga, 12 September 2024,

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,**





**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN KEUANGAN DAERAH**

Jalan Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Faks. (0281) 893116
E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id, bakeuda.purbalinggakab@gmail.com

**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
TAHUN 2025**

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DIAMPU: PENUNJANG PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Penganggaran responsif gender yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, penganggaran tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan anggaran, tetapi juga pada analisis mendalam terkait dampak anggaran terhadap berbagai kelompok gender. Ini berarti bahwa proses penyusunan anggaran melibatkan identifikasi ketimpangan gender yang ada, baik dalam akses terhadap layanan publik maupun dalam partisipasi dalam pembangunan, sehingga kebijakan keuangan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan.</p> <p>Proses penganggaran responsif gender melibatkan berbagai langkah, mulai dari pengumpulan data yang terpilah berdasarkan gender, analisis dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan, hingga penyesuaian alokasi anggaran yang mendukung kesetaraan gender. Dalam hal ini, Badan Keuangan Daerah bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan memperhitungkan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok masyarakat. Misalnya, dalam sektor pendidikan, alokasi anggaran yang responsif gender akan mempertimbangkan bagaimana perempuan dan anak perempuan dapat lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, termasuk dalam penyediaan fasilitas yang ramah gender. Begitu pula dalam sektor kesehatan, penganggaran yang peka terhadap gender akan melihat apakah perempuan mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.</p> <p>Manfaat penganggaran responsif gender bagi pembangunan sangat signifikan dan luas cakupannya. Pertama, penganggaran ini dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial, yang</p>

selama ini seringkali lebih menguntungkan kelompok tertentu, khususnya laki-laki. Dengan adanya kebijakan anggaran yang lebih inklusif, perempuan dan kelompok marginal lainnya akan lebih mudah mendapatkan manfaat dari pembangunan. Kedua, penganggaran yang peka gender berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perempuan, yang seringkali memegang peran penting dalam keluarga dan masyarakat, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Lebih jauh lagi, penganggaran responsif gender mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Misalnya, dengan memberikan alokasi anggaran yang lebih adil untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan, mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemberdayaan ekonomi perempuan ini dapat berupa program pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, atau akses yang lebih mudah terhadap pasar. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkecil kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, sekaligus meningkatkan kontribusi perempuan dalam penguatan ekonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan gender, penganggaran responsif gender berperan penting dalam mengatasi ketimpangan struktural yang seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Kesenjangan ini bisa dalam bentuk diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, atau layanan kesehatan. Dengan demikian, penganggaran yang memperhatikan perspektif gender bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini dengan menyusun kebijakan keuangan yang mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang gender.

Penganggaran responsif gender juga membantu mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan memperhitungkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini penting karena kebijakan yang dianggap "netral gender" seringkali gagal menangkap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan, terutama dalam konteks budaya dan sosial yang masih membatasi peran perempuan di masyarakat. Sebagai contoh, jika kebijakan pembangunan infrastruktur tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan, seperti akses yang aman ke tempat kerja atau fasilitas publik yang ramah gender, maka dampak kebijakan tersebut tidak akan merata bagi semua kelompok masyarakat.

Pada akhirnya, penganggaran responsif gender yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah berkontribusi pada terciptanya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penganggaran, pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya memajukan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif semua kelompok dalam proses pembangunan, tanpa terkecuali. Kesetaraan gender dalam penganggaran juga menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan yang lebih adil, di mana setiap warga

	<p>negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, dan manfaat pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RKA (n+2) OPD yang Telah dilampirkan Anggaran Responsif Gender <ul style="list-style-type: none"> Dinas/Badan = 27 Kecamatan = 18 - Kontrol: <p>Meskipun dalam penyusunan PPRG telah dilaksanakan, peninjauan terhadap kualitas dokumen GAP dan GBS belum pernah dilakukan"</p> - Belum adanya aturan dari Kepala Daerah maupun Sekretariat Daerah yang mengamankan pelampiran GAP dan GBS dalam proses penyusunan PPRG - Pemahaman terhadap pentingnya PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran belum melembaga di tingkat Bakeuda dan TAPD sehingga belum menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. - Belum dipahaminya mekanisme penyusunan GAP dan GBS oleh OPD <p>Berkaca pada kondisi tersebut, Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga bermaksud untuk melaksanakan kegiatan tersebut</p> 	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan kualitas Dokumen yang Responsif Gender
	Rencana Tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penelaahan RKA 2. Rapat Koordinasi Internal bersama dengan TAPD tentang mekanisme PPRG dan pentingnya dalam perencanaan penganggaran 3. Pelaksanaan Evaluasi RKA 4. Monitoring dan Evaluasi
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp.84.347.000
	SDM	TIM TAPD
	Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> - LAPTOP - PRINTER
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun <p>Target Kinerja:</p> <p>2 Dokumen</p>	

Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 %
Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD <p>Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 %
Optimum Outcome/Sasaran	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu <p>Target Kinerja:</p> <p>100 %</p>
Dampak/Tujuan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini WTP

Purbalingga, 12 September 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



SISWANTO, S.Pt.,M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 197205271998031005

Matriks Lembar Kerja
Gender Analysis Pathway (GAP) Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga
Tahun 2025

BARIS 1	URUSAN		Penunjang Pemerintahan
	NAMA OPD		Badan Keuangan Daerah
	PROGRAM		Program Pengelolaan Keuangan Daerah
	KEGIATAN		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
	SUB KEGIATAN		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	TUJUAN SUB BIDANG		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
BARIS 2	DATA PEMBUKA WAWASAN (Data Pilah Gender)		Jumlah RKA (n) OPD yang Telah dilampirkan Anggaran Responsif Gender Dinas/Badan = 27 Kecamatan = 18
BARIS 3	ISU GENDER	Faktor kesenjangan / permasalahan (452)	"Kontrol: Meskipun dalam penyusunan PPRG telah dilaksanakan, peninjauan terhadap kualitas dokumen GAP dan GBS belum pernah dilakukan" Belum adanya aturan dari Kepala Daerah maupun Sekretariat Daerah yang mengamanatkan pelampiran GAP dan GBS dalam proses penyusunan PPRG
		Sebab Kesenjangan Internal	Pemahaman terhadap pentingnya PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran belum melembaga di tingkat Bakeuda dan TAPD sehingga belum menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran
		Sebab Kesenjangan Eksternal	Belum dipahaminya mekanisme penyusunan GAP dan GBS oleh OPD
BARIS 4	TUJUAN SUB KEGIATAN RESPONSIF GENDER		Meningkatkan kualitas Dokumen yang Responsif Gender
BARIS 5	RENCANA AKSI		1. Pembentukan tim penelaahan RKA 2. Rapat Koordinasi Internal bersama dengan TAPD tentang mekanisme PPRG dan pentingnya dalam perencanaan penganggaran 3. Pelaksanaan Evaluasi RKA

		4. Monitoring dan Evaluasi
BARIS 6	BASELINE DATA	Jumlah RKA (n) OPD yang Telah dilampirkan Anggaran Responsif Gender Dinas/Badan = 27 Kecamatan = 18
BARIS 7	PENGUKURAN HASIL	Output/Sub Kegiatan Indikator Kinerja: 1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Target Kinerja: 2 Dokumen
		Immediate Outcome/Kegiatan Indikator Kinerja: - Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu Target Kinerja: - 100 %
		Intermediate Outcome/Program Indikator Kinerja: - Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD Target Kinerja : - 100 %
		Optimum Outcome/Sasaran Indikator Kinerja: - Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu Target Kinerja: - 100 %
		Dampak/Tujuan Indikator Kinerja: - Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Target Kinerja: - Opini WTP

Purbalingga, 12 September 2024,

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,**



SISWANTO, S.Pt.,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197205271998031005



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah
Telepon (0281) 891098, 893116, 896216 Faks. (0281) 893116
E-mail : bakeuda@purbalinggakab.go.id, bakeuda.purbalinggakab@gmail.com

PERNYATAAN ANGGARAN GENDER TAHUN 2025

NAMA OPD : BADAN KEUANGAN DAERAH
URUSAN YANG DIAMPU: PENUNJANG PEMERINTAHAN
KABUPATEN/KOTA : PURBALINGGA
PROVINSI : JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN : 2025

PROGRAM	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
SUB KEGIATAN	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
ANALISIS SITUASI (Ambilkan baris 2 dan 3 pada GAP)	<p>Penganggaran responsif gender yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah merupakan pendekatan strategis dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang bertujuan untuk memastikan bahwa alokasi sumber daya keuangan memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan tantangan yang dihadapi oleh laki-laki dan perempuan. Dalam konteks ini, penganggaran tidak hanya berfokus pada aspek teknis penyusunan anggaran, tetapi juga pada analisis mendalam terkait dampak anggaran terhadap berbagai kelompok gender. Ini berarti bahwa proses penyusunan anggaran melibatkan identifikasi ketimpangan gender yang ada, baik dalam akses terhadap layanan publik maupun dalam partisipasi dalam pembangunan, sehingga kebijakan keuangan yang dihasilkan lebih inklusif dan berkeadilan.</p> <p>Proses penganggaran responsif gender melibatkan berbagai langkah, mulai dari pengumpulan data yang terpilah berdasarkan gender, analisis dampak kebijakan terhadap laki-laki dan perempuan, hingga penyesuaian alokasi anggaran yang mendukung kesetaraan gender. Dalam hal ini, Badan Keuangan Daerah bekerja sama dengan instansi lain untuk memastikan bahwa program-program yang diusulkan memperhitungkan kebutuhan spesifik dari setiap kelompok masyarakat. Misalnya, dalam sektor pendidikan, alokasi anggaran yang responsif gender akan mempertimbangkan bagaimana perempuan dan anak perempuan dapat lebih mudah mengakses pendidikan berkualitas, termasuk dalam penyediaan fasilitas yang ramah gender. Begitu pula dalam sektor kesehatan, penganggaran yang peka terhadap gender akan melihat apakah perempuan mendapatkan akses yang memadai terhadap layanan kesehatan ibu dan anak.</p> <p>Manfaat penganggaran responsif gender bagi pembangunan sangat signifikan dan luas cakupannya. Pertama, penganggaran ini dapat mengurangi kesenjangan akses terhadap sumber daya publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial, yang</p>

selama ini seringkali lebih menguntungkan kelompok tertentu, khususnya laki-laki. Dengan adanya kebijakan anggaran yang lebih inklusif, perempuan dan kelompok marginal lainnya akan lebih mudah mendapatkan manfaat dari pembangunan. Kedua, penganggaran yang peka gender berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, karena dengan memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan perempuan, yang seringkali memegang peran penting dalam keluarga dan masyarakat, dampaknya akan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak.

Lebih jauh lagi, penganggaran responsif gender mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Misalnya, dengan memberikan alokasi anggaran yang lebih adil untuk program pemberdayaan ekonomi perempuan, mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pemberdayaan ekonomi perempuan ini dapat berupa program pelatihan keterampilan, penyediaan modal usaha, atau akses yang lebih mudah terhadap pasar. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkecil kesenjangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, sekaligus meningkatkan kontribusi perempuan dalam penguatan ekonomi daerah.

Dalam kaitannya dengan gender, penganggaran responsif gender berperan penting dalam mengatasi ketimpangan struktural yang seringkali menjadi hambatan bagi perempuan untuk mengakses sumber daya dan berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan. Kesenjangan ini bisa dalam bentuk diskriminasi dalam akses terhadap pendidikan, kesempatan kerja, atau layanan kesehatan. Dengan demikian, penganggaran yang memperhatikan perspektif gender bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi ini dengan menyusun kebijakan keuangan yang mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat tanpa memandang gender.

Penganggaran responsif gender juga membantu mempromosikan nilai-nilai keadilan sosial. Dengan memperhitungkan perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Hal ini penting karena kebijakan yang dianggap "netral gender" seringkali gagal menangkap ketidaksetaraan yang dihadapi oleh perempuan, terutama dalam konteks budaya dan sosial yang masih membatasi peran perempuan di masyarakat. Sebagai contoh, jika kebijakan pembangunan infrastruktur tidak mempertimbangkan kebutuhan perempuan, seperti akses yang aman ke tempat kerja atau fasilitas publik yang ramah gender, maka dampak kebijakan tersebut tidak akan merata bagi semua kelompok masyarakat.

Pada akhirnya, penganggaran responsif gender yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah berkontribusi pada terciptanya pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam penganggaran, pemerintah daerah dapat menciptakan kebijakan yang tidak hanya memajukan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga memperkuat partisipasi aktif semua kelompok dalam proses pembangunan, tanpa terkecuali. Kesetaraan gender dalam penganggaran juga menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan yang lebih adil, di mana setiap warga

	<p>negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki akses yang setara terhadap peluang, sumber daya, dan manfaat pembangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah RKA (n) OPD yang Telah dilampirkan Anggaran Responsif Gender Dinas/Badan = 27 Kecamatan = 18 - Kontrol: Meskipun dalam penyusunan PPRG telah dilaksanakan, peninjauan terhadap kualitas dokumen GAP dan GBS belum pernah dilakukan" - Belum adanya aturan dari Kepala Daerah maupun Sekretariat Daerah yang mengamanatkan pelampiran GAP dan GBS dalam proses penyusunan PPRG - Pemahaman terhadap pentingnya PUG dalam proses perencanaan dan penganggaran belum melembaga di tingkat Bakeuda dan TAPD sehingga belum menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran. - Belum dipahaminya mekanisme penyusunan GAP dan GBS oleh OPD Berkaca pada kondisi tersebut, Badan Keuangan Kabupaten Purbalingga bermaksud untuk melaksanakan kegiatan tersebut 	
RENCANA TINDAK	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Tujuan Sub kegiatan Responsif gender	Meningkatkan kualitas Dokumen yang Responsif Gender
	Rencana Tindak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan tim penelaahan RKA 2. Rapat Koordinasi Internal bersama dengan TAPD tentang mekanisme PPRG dan pentingnya dalam perencanaan penganggaran 3. Pelaksanaan Evaluasi RKA 4. Monitoring dan Evaluasi
ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran	Rp.78.093.000,-
	SDM	TIM TAPD
	Peralatan dan Mesin	<ul style="list-style-type: none"> - LAPTOP - PRINTER
Output/Sub Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun <p>Target Kinerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 Dokumen 	

Immediate Outcome/Kegiatan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan KUA , PPAS, KUA Perubahan, PPAS Perubahan, Perda dan Perkada APBD, Perda dan Perkada APBD Perubahan tepat Waktu <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 %
Intermediate Outcome/Program	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Keselarasan APBD terhadap RKPD <p>Target Kinerja :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 %
Optimum Outcome/Sasaran	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan Tepat Waktu <p>Target Kinerja:</p> <p>100 %</p>
Dampak/Tujuan	<p>Indikator Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah <p>Target Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opini WTP

Purbalingga, 12 September 2024

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH,



SISWANTO, S.Pt.,M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP.197205271998031005